



Politik Pembangunan Pemerintah Desa dalam Pemerataan Infrastruktur Antar Dusun di Desa Medan Estate Kabupaten Deli Serdang

Anggun Adelita^{1*}, Enjelita Dwi Maharani², Fahira Silva Dilla Nst³, Julia Ivanna⁴

¹⁻⁴Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: anggunadelita4@gmail.com¹, enjelitamaharani94@gmail.com², fahirasilva03@gmail.com³, juliaivanna@unimed.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: anggunadelita4@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the development politics implemented by the Medan Estate Village Government in achieving equitable infrastructure development among hamlets, examine the role of the village government in determining development priorities, and identify efforts undertaken to promote infrastructure equity. This research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving five informants, consisting of the Head of Welfare and Service Affairs and four community members of Medan Estate Village. The findings reveal that infrastructure development politics in Medan Estate Village is carried out through a planning process that actively involves community participation through village deliberation meetings. The village government plays a significant role as planner, implementer, supervisor, and facilitator of development while emphasizing communication and transparency with the community. Efforts to achieve equitable infrastructure development are implemented gradually based on development priorities and the specific needs of each hamlet. Although challenges remain, particularly limited budget allocations and numerous infrastructure demands, the community perceives that infrastructure development in Medan Estate Village has improved significantly compared to previous years. Therefore, continuous efforts are required to ensure a more optimal and equitable distribution of infrastructure development across all hamlets.

Keywords: Development Equity; Development Politics; Development Priorities; Infrastructure Development; Village Government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medan Estate dalam pemerataan infrastruktur antar dusun, peran pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan, serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lima informan yang terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan serta empat orang masyarakat Desa Medan Estate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik pembangunan infrastruktur di Desa Medan Estate dilaksanakan melalui proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Pemerintah desa berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan fasilitator pembangunan dengan mengutamakan komunikasi serta transparansi kepada masyarakat. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masing-masing dusun. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi, masyarakat menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Medan Estate telah mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang lebih optimal di seluruh dusun.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur; Pemerataan Pembangunan; Pemerintah Desa; Politik Pembangunan; Prioritas Pembangunan.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan menjadi salah satu aspek penting yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, drainase, sarana air bersih, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa (Kesuma & Muhtaj, 2026).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa telah memberikan dukungan yang besar terhadap pembangunan desa. Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan merata. Beberapa dusun sering kali memperoleh pembangunan yang lebih banyak dibandingkan dusun lainnya sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam satu desa. Kondisi ini menjadikan pemerataan pembangunan sebagai salah satu tantangan penting yang harus dihadapi oleh pemerintah desa.

Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh proses politik pembangunan yang berlangsung di tingkat desa. Politik pembangunan desa dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan mengenai prioritas pembangunan yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam proses tersebut, berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dari setiap dusun bertemu dan dipertimbangkan untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan (Hadawiya et al., 2021).

Menurut penelitian Hadawiya, Muda, dan Batubara (2021), partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Musrenbang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali masih rendah sehingga aspirasi dari sebagian masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan berpotensi belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan kebutuhan seluruh wilayah desa.

Selain itu, penelitian Kesuma dan El Muhtaj (2025) mengenai penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepentingan umum. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah desa perlu memperhatikan pemerataan pembangunan antar dusun agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kebutuhan antar wilayah, serta dinamika sosial masyarakat yang beragam.

Desa Medan Estate sebagai salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa dusun dengan kondisi dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu menyusun kebijakan pembangunan yang adil dan merata sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tanpa adanya kesenjangan antar dusun. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana politik pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan pemerataan pembangunan antar dusun.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis politik pembangunan pemerintahan desa dalam pemerataan infrastruktur antar dusun di Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Politik Pembangunan

Secara filosofis, konsep politik pembangunan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara proses politik dan pembangunan. Politik pembangunan tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk melaksanakan pembangunan, tetapi juga sebagai cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik yang dibuat oleh pemerintah.

Politik pembangunan juga dapat dipahami sebagai strategi, model, atau dasar kebijakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara pada periode tertentu. Oleh karena itu, pembangunan merupakan hasil dari pilihan politik (*political choice*) yang melibatkan berbagai alternatif kebijakan serta mengandung strategi tertentu dalam pelaksanaannya (Ratnasari, 2020).

Dalam proses pembangunan, terdapat berbagai aktor yang berperan dan saling memengaruhi satu sama lain melalui aktivitas politik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Maslow, terdapat tiga kelompok utama yang terlibat dalam pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah berperan sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pembangunan, masyarakat menjadi sasaran sekaligus penerima manfaat pembangunan, sedangkan sektor swasta berfungsi sebagai pendukung yang membantu pelaksanaan pembangunan melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya. Ketiga aktor tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan memengaruhi dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Apabila pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat berpartisipasi secara aktif serta bekerja sama dengan baik dalam proses pembangunan, maka tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan lebih mudah tercapai (Pambudi & Kurniasari, 2021).

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan urusan negara yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Sementara itu, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat dipahami sebagai proses penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat desa oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Melalui kewenangan yang dimiliki tersebut, pemerintah desa dan masyarakat memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa.

Pelaksanaan pemerintahan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan kepentingan bersama bagi seluruh warga yang berada dalam wilayah desa (Suharto & Maryam, 2023).

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat (Apriyani & Arif, 2019).

Pembangunan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki kemampuan dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sugianto & Permadhy, 2020).

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa (Naimnule et al., 2024).

Pemerataan Infrastruktur

Infrastruktur desa merupakan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah desa untuk mendukung aktivitas masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Infrastruktur desa mencakup jalan desa, jembatan, drainase, irigasi, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berfungsi menunjang kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Infrastruktur menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan desa karena keberadaannya dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta kualitas hidup masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan rekan-rekan, pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian penting dari pembangunan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan (Cahyani et al., 2023).

Pemerataan infrastruktur merupakan proses pendistribusian pembangunan sarana dan prasarana secara adil dan seimbang ke seluruh wilayah agar setiap masyarakat memperoleh akses dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Dalam konteks desa, pemerataan infrastruktur berarti pembangunan tidak hanya terpusat pada satu dusun atau wilayah tertentu, tetapi menjangkau seluruh dusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerataan infrastruktur bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Dalam konteks pembangunan desa, pemerataan infrastruktur menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Pemerataan tersebut dapat dilihat dari penyebaran pembangunan jalan, drainase, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang menjangkau seluruh dusun atau wilayah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hilman & Asmoro, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini (Syahrizal & Jailani, 2023). Penelitian adalah studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis mengenai Politik Pembangunan Pemerintahan Desa Dalam Pemerataan Infranstruktur Antar Dusun di Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, politik pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Medan Estate dalam pemerataan infrastruktur antar dusun dilaksanakan melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dilakukan melalui musyawarah desa yang menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, dan aspirasi pembangunan.

Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menerapkan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori politik pembangunan yang dikemukakan oleh Ratnasari (2020), bahwa pembangunan merupakan hasil dari pilihan-pilihan politik yang dilakukan pemerintah dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan. Dalam konteks Desa Medan Estate, politik pembangunan terlihat dari proses penentuan prioritas pembangunan yang dilakukan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi yang ada di setiap dusun. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang akan menerima manfaat pembangunan tersebut.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas, sekaligus fasilitator pembangunan. Peran tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa mulai dari penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan. Selain itu, pemerintah desa juga aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui berbagai kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang ada di lingkungan desa.

Peran pemerintah desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa pemerintah desa cukup aktif dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah desa tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur serta mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun, pemerintah Desa Medan Estate berusaha agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi dusun tertentu.

Pemerintah desa berupaya melakukan pembangunan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi infrastruktur yang ada di masing-masing dusun. Kebijakan tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki desa sehingga tidak semua kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan dalam waktu yang bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasakan adanya peningkatan pembangunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai fasilitas umum telah mengalami perbaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meskipun demikian, masyarakat juga mengakui bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat beberapa fasilitas dan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemerataan pembangunan masih memerlukan waktu dan perencanaan yang berkelanjutan agar seluruh dusun dapat memperoleh manfaat pembangunan secara merata.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Kesuma dan El Muhtaj (2025) yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, dan kepentingan umum. Pemerataan pembangunan menjadi hal yang penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap dusun merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medan Estate telah mengarah pada upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun. Pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, menjalankan perannya secara aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, serta melaksanakan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran desa. Walaupun masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur di Desa Medan Estate telah menunjukkan perkembangan yang positif dan diharapkan dapat semakin merata di seluruh dusun pada masa yang akan datang.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Politik pembangunan pemerintahan desa dalam pemerataan infrastruktur antar dusun di Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Medan Estate telah dilaksanakan melalui proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa yang menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya partisipasi tersebut, pembangunan yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun. Pemerintah Desa Medan Estate juga telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.

Peran tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang ada di lingkungan desa.

Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Medan Estate secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa. Meskipun pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya keterbatasan anggaran dan banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi, masyarakat menilai bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Medan Estate telah mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur dapat semakin merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di setiap dusun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa perlu terus meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun dengan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah secara adil dan merata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan pembangunan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan pula pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Medan Estate tanpa adanya kesenjangan antar dusun.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Peneletian Kualitatif. In CV. syakir Media Press.
- Apriyani, L., & Arif, D. B. (2019). Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Desa Toyareka Kecamatan Ke- mangkon Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61–66.
- Cahyani, E. N., Safitri, M., Handayani, P. R., & Apridheo, P. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Muara Baru. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(2), 534–541.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Ferdiana, N. A., Wijaya, D., & Rinayuhani, T. R. (2025). Dari Partisipasi ke Keberlanjutan : Implementasi Tata Kelola Inklusif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Journal of Global Humanistic Studies*, 3(4), 75–84.
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. (2020). Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan D*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.32669/village>
- Kesuma, F. T., & Muhtaj, M. El. (2026). Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Bagan Serdang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 162–173.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Naimnule, F., Mael, M. Y., & Suni, M. (2024). Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dalam Perspektif Good Governance (Studi Penelitian Di Desa Fafinesu A Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten TTU). *Jurnal Poros Politik*, 6(3), 23–30.
- Pambudi, H. D. A., & Kurniasari, N. (2021). Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(2), 107–114.
- Ramdhani Devi, S. N., & Sulisty, A. Q. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 258–275. <https://doi.org/10.31933/abavev36>
- Ratnasari, P. (2020). Politik Pembangunan Di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(1), 1–10.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.35475/ripte.v17i1.176>
- Saputra, D., Sunarto, I., & Asmuni. (2024). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(2), 214–225.

- Sugianto, & Permadhy, Y. T. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecces: Economics, Social, and Development Studies*, 7(1), 87–109. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13565>
- Suharto, & Maryam, D. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Duwet, Bojong, Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Qiatie*, 16(2), 236–251.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Sulung. Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier, 5(September), 121–125. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>